



**Realisasi APBN Wilayah Sumsel Tumbuh Positif
Mendorong Stabilitas Perekonomian**

Palembang, 20 September 2024 – Kinerja pelaksanaan APBN Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan tren positif hingga 31 Agustus 2024. Hal ini ditunjukkan melalui kinerja realisasi pendapatan dan belanja negara yang tetap tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu. Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal yang ditunjukkan melalui realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang lebih tinggi dari tahun lalu.

Aktivitas perekonomian di Sumsel dalam tren yang positif. Hal ini ditunjukkan melalui tingkat inflasi per Agustus 2024 tercatat sebesar 1,80% (yoy). Angka tersebut berada di bawah rata-rata inflasi nasional yang sebesar 2,12% (yoy). Neraca perdagangan bulan Agustus 2024 surplus USD399,87 juta yang secara kumulatif hingga Agustus 2024, surplus neraca perdagangan di Sumsel mencapai USD2,64 miliar.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah Sumsel hingga Agustus 2024 terus menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh 14,62% dengan realisasi sebesar Rp12.795,51 miliar atau 55,87% dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari pajak sebesar Rp10.526,88 miliar atau terealisasi sebesar 51,92%, kepabeanan dan cukai sebesar Rp181,49 miliar atau terealisasi sebesar 47,91%, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2.087,13 miliar atau terealisasi 92,72%.

Sementara itu, dari sisi belanja negara terealisasi sebesar Rp31.852,68 miliar atau terealisasi sebesar 60,24% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp11.038,36 miliar atau terealisasi 52,07%, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp20.814,32 miliar atau terealisasi sebesar 65,71%. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp24,61 triliun atau terealisasi 55,33% dari target. Belanja daerah tercatat sebesar Rp23,06 triliun atau 50,66% dari pagu. Kinerja APBD menunjukkan pertumbuhan yang didorong oleh pendapatan dari dana transfer



dan kinerja belanja daerah yang lebih besar pada setiap jenis belanja jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pendapatan daerah tumbuh positif 10,64% dan belanja daerah tumbuh positif 19,50%. Realisasi pendapatan dari dana transfer dan realisasi seluruh jenis belanja daerah merupakan faktor pendorong pertumbuhan kinerja APBD tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmadi Murwanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumsel mewakili seluruh Kepala Kanwil Kemenkeu di Sumatera Selatan dalam rapat pleno Forum *Asset and Liability Committee* (ALCo) Sumsel yang beranggotakan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan.

Dari sisi pendapatan negara, penerimaan pajak sampai Agustus 2024 mencapai 51,9% dari target APBN, dengan pertumbuhan netto sebesar 6,0%. Pertumbuhan ini didorong oleh pembayaran PPN DN dan PPh Final atas kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pembayaran PPh 21 di seluruh sektor yang menunjukkan baiknya level penghasilan karyawan. Disisi lain, penerimaan PPh Non Migas tumbuh positif sebesar 6,4% yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di Sumsel. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp181,49 miliar dengan realisasi bea masuk mengalami peningkatan 21,68% (yoy) yang disebabkan adanya peningkatan importasi beras, bahan baku karet, dan mesin. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif, terdiri dari pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,44 triliun, pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp644,42 miliar yang termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang sebesar Rp58,58 miliar. Kondisi ini menunjukkan resiliensi yang baik pada aktivitas ekonomi di wilayah Sumsel.

Belanja negara di wilayah Sumsel sampai dengan 31 Agustus 2024 terealisasi sebesar Rp31,85 triliun. Kinerja belanja negara tersebut tumbuh positif sebesar 23,24% (yoy) karena didorong dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) yang mengalami peningkatan dan mencatatkan tren positif pada hampir semua jenis TKD. Kinerja Belanja K/L tumbuh positif 26,66% (yoy), belanja ini dipergunakan untuk mendukung peningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN), mendukung kegiatan operasional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penuntasan proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, kegiatan pemilu dan pilkada, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Penyaluran TKD mencatatkan tren positif 21,49% (yoy) yang digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 18 pemda wilayah Sumsel. Penyaluran ini diharapkan memberikan kemanfaatan pada belanja produktif yang dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Tercatat Rp20,81 triliun atau 65,71% dari pagu telah tersalur (lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama). Faktor pendorong utama kinerja positif ini adalah pertumbuhan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal di Sumsel.

Sebagai kesimpulan, perekonomian Sumsel tetap berada pada kondisi yang positif. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh baik, kondisi inflasi yang terkendali, dan aktivitas perekonomian masyarakat yang terjaga. Realisasi anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, hingga Agustus 2024 tumbuh positif.



Narahubung:

Muhamad Octariyaddi

Plt. Ketua Pokja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik
Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang
Jl. Sukabangun II, Sukarami, Sukajaya, Palembang 30151